Bali Post

99 Investor Dalam Negeri Tanam Modal

# Investasi Capai Rp 715 Miliar

**Semarapura (Bali Post) –**

**Penanaman modal dalam negeri di Kabupaten Klungkung telah mencapai angka Rp 715 miliar. Jumlah investasi ini berasal dari 99 investor yang membuka berbagai usaha di wilayah Klungkung. Besarnya jumlah investasi tidak terlepas dari promosi yang dilakukan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung tiap tahunnya.**

Kepala Kantor Penanaman Modal Klungkung Ida Bagus Jumpung Gede Oka Wedana mengungkapkan, setiap kecamatan memiliki potensi besar untuk mendatangkan investasi. Ini terlihat dari investor yang melakukan penanaman modal di seluruh kecamatan. "Dari empat kecamatan, paling banyak berada di Kecamatan Nusa Penida, yang mencapai 47 investor dengan jumlah investasi Rp 601 miliar," jelasnya, Kamis (5/11) kemarin.

Investasi di Klungkung didominasi bidang pariwisata, perdagangan, dan jasa akomodasi. Data ini berdasarkan permohonan izin prinsip yang dilakukan perusahaan yang membuka usaha. Investasi yang paling menjanjikan terutama di bidang pariwisata. Ini terlihat dari laporan yang diterima Kantor Penanaman Modal setiap enam bulan sekali.

Tingginya nilai investasi membuat pihaknya optimis dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klungkung. Untuk terus meningkatkan jumlah investasi, Kantor Penanaman Modal juga melakukan promosi dengan mengikuti berbagai pameran di luar daerah.

Menurutnya, banyak investor yang melirik investasi bidang pariwisata di Kecamatan Nusa Penida. Ini terjadi mengingat prospek yang dimiliki kecamatan kepulauan tersebut. Namun, kendala sarana pendukung seperti infrastruktur, transportasi, listrik, dan air menjadi pertimbangan para investor menanamkan modalnya.

Masalah sepadan pantai juga menjadi kendala para investor untuk dapat membangun di lokasi strategis.

Selain penanaman modal dalam negeri, investasi juga dilakukan oleh pemodal asing yang berjumlah 51 investor tahun ini. Nilai investasi asing mencapai 217 juta dolar AS ditambah Rp 76 juta. Khusus di Nusa Penida, investasi didominasi sektor hotel dan restoran. Sementara investasi asing di kecamatan lainnya berupa industri dan jasa akomodasi. **(dwa)**

Edisi : Jum'at, 6 November 2015

Hal : 10

Bali Post

# Dikoreksi, Dana Operasional RS Pratama

**Singaraja (Bali Post) –**

Rumah Sakit (RS) Pratama di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt ditarget akan beroperasi Januari 2016 mendatang. Untuk mengejar target tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng memerlukan dana operasional Rp 15 miliar. Kebutuhan anggaran sebanyak itu belum bisa dipenuhi seratus persen. Dari total anggaran itu yang diusulkan pada APBD induk 2016 baru bisa dipenuhi Rp 8 miliar. Itu artinya, Dinkes masih kekurangan dana Rp 7 miliar.

Kepala Dinkes Buleleng dr. I Gusti Ngurah Nyoman Mahapramana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Buleleng belum lama ini mengatakan, sejak gedung RS Pratama dibangun, Dinkes melakukan pengkajian dalam hal penyiapan operasional dan sumber daya manusia (SDM). Dari kajian itu untuk operasional ini dibutuhkan anggaran Rp 15 miliar. Kebutuhan anggaran ini pun sudah diusulkan dalam dokumen KUA dan PPAS yang telah dibahas oleh pemerintah bersama DPRD Buleleng.

Dalam proses pembahasan ini, lanjut Mahapramana, usulan anggaran operasional itu belum bisa dipenuhi seratus persen. Dari total anggaran yang diperlukan itu untuk tahap awal baru bisa dipenuhi Rp 8,6 miliar. Dengan demikian, dana operasional ini masih kekurangan Rp 7 miliar. Terkait dengan itu, Dinkes sudah melakukan koordinasi dan menjelaskan secara detail kebutuhan dana operasional agar bisa dipenuhi seratus persen. Hal ini dilakukan karena mendesaknya kebutuhan anggaran operasional tersebut. Karena kebutuhan anggaran tahun depan yang cukup tinggi, sehingga pengurangan dana ini bisa diterima. Masalah kekurangannya itu ke depan akan bisa diupayakan melalui tambahan anggaran APBD Perubahan. **(kmb38)**

Edisi : Jumlat, 6 November 2015

Hal : 7

Bali Post

# Empat Pemda Jadi Sampel Implementasi SAP Berbasis Akrual

**Denpasar (Bali Post) -**

**Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa mengatakan, BPK memilih empat pemerintahan di Bali menjadi sampel pemeriksaan terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Masing-masing, Pemprov Bali, Pemkab Badung, Pemkab Gianyar, dan Pemkot Denpasar. Ada tiga sasaran pemeriksaan BPK yakni aspek komitmen, regulasi dan kebijakan, aspek pengelolaan SDM, serta aspek pengelolaan teknologi informasi.**

"Dapat diambil sampel, pada aspek pertama, di mana level Provinsi Bali, capaian kerja pemerintah daerah adalah 41,07% dan belum ada pemerintah daerah sampel yang melebihi capaian 50%," ujarnya saat penyerahan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual kepada empat pemerintah daerah yang menjadi sampel pemeriksaan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (5/11) kemarin.

Dori menjelaskan dari aspek pertama tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Antara lain, tidak ada rencana atau strategi implementasi SAP berbasis akrual secara memadai dan lainnya. Terkait masalah tersebut BPK merekomendasikan agar menyusun rencana strategis/*roadmap*/*blueprint* penerapan SAP berbasis akrual.

"Kami berharap tahun 2015 yang laporannya disusun berdasarkan SAP berbasis akrual, pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP dapat tetap mempertahankan opini tersebut. Sedangkan pemerintah yang masih mendapat opini WDP pada tahun anggaran 2014 dapat meningkatkan opini yang diperolehnya menjadi opini WTP pada tahun anggaran 2015," imbuhnya.

Dori mencatat lima kabupaten dan satu kota yang mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK terkait laporan keuangan 2014. Sementara tiga kabupaten masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). **(kmb32)**

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.
Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

Edisi : Jum'at, 6 November 2015

Hal : 2

Bali Post

Kasus Dugaan Korupsi "Dana Punia"

# Lagi, Titib dan Praptini Digiring ke Kejari

**Denpasar (Bali Post) -**

Terpidana Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. dan Dr. Praptini, M.Pd. yang saat ini mendekam di Lapas Kerobokan, Kamis (5/11) kemarin digiring ke Kejari Denpasar oleh jaksa dari Kejati Bali. Mantan Rektor dan Kabiro Umum di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar tersebut kembali dijerat kasus dugaan korupsi untuk *dana punia* penerimaan mahasiswa baru di lingkungan kampus yang dipimpinnya. Oleh jaksa Gede Arthana dan Hari Soetopo dilakukan pelimpahan tahap II yakni pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejari Denpasar.

"Ya, hari ini dilakukan pelimpahan tahap II. Tersangka yang juga terpidana ini kami hadirkan langsung dalam pelimpahan ini," ucap Gede Arthana bersama Hari Soetopo.

Dijelaskan, dalam perkara ini terdapat kerugian negara sebagaimana audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali, sebesar Rp 752.834.939.

Ikhwal kasus ini bermula dari adanya dugaan pungutan liar dalam bentuk *dana punia* terhadap calon mahasiswa baru di lingkungan IHDN Denpasar. Itu terjadi kurun waktu antara tahun 2011-2012.

Kala itu, ada kebijakan mengurangi besaran biaya Sumbangan Dana Penunjang Pendidikan (SDPP) bagi calon mahasiswa baru dan mengalihkan selisih pengurangan biaya SDPP tersebut menjadi biaya *dana punia*. Biaya SDPP sebelumnya sudah diatur dalan Keputusan Rektor No. IHN/542a/Kep/2011 tanggal 28 April 2011. Namun, tersangka Rektor IHDN Prof. Titib mengeluarkan keputusan rektor baru dengan nomor, tanggal dan tahun yang sama, namun dalam keputusan tersebut menyebutkan tentang pengurangan nilai biaya SDPP. Kemudian tersangka Praptini menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru agar dalam pelaksanaan mencantumkan *dana punia* sebagai bagian dari biaya penerimaan mahasiswa baru.

*Dana punia* itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan ibadah dan sosial yang anggarannya tidak tersedia atau tidak tercukupi. Untuk meyakinkannya, Praptini mengatakan persoalan tersebut telah dikonsultasikan dan mendapat izin dari Kementerian Agama. Atas kondisi itu, pihak kejaksaan menemukan adanya kecurangan, sehingga dilakukan penyelidikan hingga akhirnya benang merah perkara ini terkuak. Prof. Titib dan Dr. Praptini, yang saat itu sedang tersandung kasus 16 item proyek di IHDN, kembali dijadikan tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka sebagaimana dalam berkas pelimpahan kemarin, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2010 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pantauan di Kejari Denpasar, baik Prof. Titib maupun Praptini terlihat lebih santai. Bahkan, Praptini juga terlihat sempat menyapa sejumlah media. Sedangkan Prof. Titib asyik membaca buku. Bahkan saat di dalam mobil, Titib masih asyik membaca bukunya. **(kmb37)**

Bali Post/kmb37

**PELIMPAHAN** - ***Terpidana Prof. Titib (dalam mobil tahanan kejaksaan) dan Dr. Praptini bersiap-siap masuk mobil ditahan dikawal polisi dan jaksa saat pelimpahan berkas tahap II.***

Edisi : Jum'at, 6 Nokembar 2015

Hal : 2

Bali Post

## Perbaiki Jalan Rusak

# PU Butuh Anggaran Rp 405 Miliar

**Bangli (Bali Post) -**

**Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bangli hingga saat ini masih banyak yang mengalami kerusakan. Dari panjang 733,24 km ruas jalan kabupaten yang ada, sekitar 30% dalam kondisi rusak parah. Untuk memperbaiki keseluruhan jalan rusak yang ada, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bangli membutuhkan anggaran sebanyak Rp 405 miliar.**

Sekretaris Dinas PU I Made Soma saat dikonfirmasi, Kamis (5/11) kemarin menjelaskan, ruas jalan yang mengalami kerusakan hampir menyebar di seluruh kecamatan. Namun, dari keempat kecamatan tersebut, jalan rusak yang terbanyak berada di Kecamatan Kintamani. "Jalan yang rusak paling banyak ada di Kecamatan Kintamani. Hampir 40% ada di sana," terangnya.

Menurut Soma, selain karena topografi wilayah Kintamani yang berbukit, banyaknya jalan rusak di daerah ini juga disebabkan suhu udara yang lebih dingin dibanding tiga kecamatan lainnya.

Faktor tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kekuatan aspal. Dikatakan Soma, untuk memperbaiki kerusakan jalan di Bangli, anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit, yakni mencapai Rp 405 miliar lebih. Akan tetapi mengingat kemampuan daerah yang masih sangat terbatas, perbaikan terhadap kerusakan jalan tidak bisa dilakukan sekaligus pada tahun 2016 mendatang. Melainkan harus dilakukan secara bertahap.

Dia memaparkan, dari Rp 405 miliar dana perbaikan yang dibutuhkan Dinas PU, peruntukannya dibagi dalam beberapa kegiatan. Untuk pemeliharaan jalan secara berkala sepanjang 54,45 km, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 55 miliar lebih. Sementara untuk peningkatan jalan sepanjang 73,294 km, dibutuhkan Rp 72 miliar. Dia mengatakan, dari sekian besar anggaran yang dibutuhkannya itu, biasanya tidak semua bisa direalisasikan. Paling tidak dana yang terealisasi sebanyak Rp 3 miliar.

Soma menambahkan, selain jalan kabupaten, sejumlah ruas jalan desa juga diakuinya mengalami kerusakan cukup parah. Kendati sesuai ketentuan perbaikan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab desa dengan menggunakan dana ADD, namun Dinas PU tetap berkewajiban untuk membantu. **(kmb40)**

Edisi : Jum'at, 6 November 2015

Hal : 8

Bali Post

*Kapal Roro Nusa Jaya Abadi* Bali Post/dwa

## "Piodalan" di Pura Dalem Ped

# Kapal Roro Siap Beroperasi

**Semarapura (Bali Post) –** Keinginan warga Nusa Penida agar Kapal Roro Nusa Jaya Abadi segera beroperasi akhirnya terwujud. Hal ini menyusul selesainya proses perbaikan kapal roro di galangan Surabaya, Jawa Timur. Jika tidak ada halangan, kapal bantuan dari Pemprov Bali tersebut akan tiba di Nusa Penida sebelum *piodalan* di Pura Dalem Ped mulai 11 November nanti. "Proses *docking* selama 38 hari sudah selesai dan tadi pagi kapal sudah bertolak dari Surabaya," ujar Kadishub dan Infokom Klungkung Nengah Sukasta, Kamis (5/11) kemarin. Kapal roro diperkirakan tiba di Nusa Penida, Sabtu (7/11) besok.

Dia tidak menampik biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan sekarang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biaya yang dianggarkan lebih dari Rp 2 miliar. Ini karena termasuk *docking* besar yang berlangsung lima tahun sekali. "Tahun depan rencananya dipasang Rp 1,6 miliar. Lebih murah karena masuk perbaikan standar," tambahnya. **(dwa)**

Edisi : Jum'at, 6 November 2015

Hal : 10